## BAB I

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan investasi sumberdaya manusia untuk jangka panjang yang memiliki nilai sangat strategis dalam meningkatkan taraf hidup. Itulah sebabnya, hampir seluruh negara di dunia menempatkan pendidikan sebagai ssuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara, seperti halnya bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat-kalimat dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, sistem pendidikan di Indonesia dilaksanakan di berbagai jenjang, mulai pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Semua jenjang ini diharapkan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang menyatakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

1

Selanjutnya Kementerian Pendidikan Nasional (2011:10) mengemukakan bahwa pendidikan memegang sejumlah peranan strategik dalam proses pembangunan sumberdaya manusia, antara lain: *Pertama*, mempersiapkan sumberdaya manusia yang dibutuhkan oleh pembangunan. *Kedua*, memberikan arah perubahan yang diinginkan oleh pembangunan. *Ketiga*, meningkatkan mutu pembangunan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Keempat*, memberikan arti bagi pembangunan dalam hal-hal yang bersifat kualitatif, mutu kehidupan dan penghidupan.

Penguasaan terhadap keterampilan tertentu hanya dapat dibangun melalui pendidikan. Dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 4 menyatakan bahwa: (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Rumusan kalimat di atas mencerminkan betapa besarnya harapan berbagai pihak terhadap pendidikan sebagai instrumen utama pengembangan sumberdaya manusia. Harapan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Supriadi (1997: 39) mengandung dimensi pesan agar pendidikan bukan hanya melebar ke samping atau kuantitatif, melainkan kualitatif atau kedalaman dan intensitas proses dan produknya. Pesan itu mengisyaratkan pula agar setiap sekolah sebagai institusi penyelenggara pendidikan semakin serius memperhatikan kualitas proses belajar mengajar dan produk pendidikan (lulusan) yang dihasilkannya.

Tidak dapat dipungkiri, kualitas pendidikan di Indonesia dianggap oleh beberapa kalangan masih belum memadai jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti mutu lulusan dari suatu jenjang pendidikan baik SMA/SMK serta perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki, sehingga bekal kecakapan yang diperoleh selama menempuh pendidikan tidak memadai untuk dapat dipergunakan secara mandiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kunandar (2009:1,2): *Pertama*, lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena rendahnya kompetensi yang dikuasai, akibatnya para lulusan sekolah ini kurang inovatif dan kreatif. *Kedua*, laporan *International Educational Achievement* (IEA) bahwa kemampuan membaca siswa SD Indonesia berada pada urutan 38 dari 39 negara yang disurvey. *Ketiga*, mutu akademik antarbangsa melalui *Programme for International Student Assesment* (PISA) menunjukkan bahwa dari 41 negara yang disurvey untuk bidang IPA, Indonesia menempati peringkat ke-38, sementara untuk bidang Matematika dan kemampuan membaca menempati peringkat ke-39, jika dibandingkan dengan Korea Selatan, untuk IPA menempati peringkat ke-8, membaca peringkat ke-7 dan matematika peringkat ke-3. *Keempat*, laporan *World Competitiveness Yearbook*, daya saing sumberdaya manusia Indonesia berada pada posisi 46 dari 47 negara yang disurvey. *Kelima,* posisi Perguruan Tinggi Indonesia yang dianggap favorit, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada hanya berada pada posisi ke-61 dan 68 dari 77 perguruan tinggi di Asia. *Keenam,* ketertinggalan Indonesia dalam bidang IPTEK dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Indikator lainnya dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (*HDI*) adalah merupakan suatu indeks komposit yang berfokus pada tiga matra dasar pembangunan manusia, yaitu menjalani hidup yang panjang dan sehat (diukur dari usia harapan hidup), kemampuan untuk menuntut ilmu (diukur dari rata-rata tahun persekolah), dan kemampuan mencapai standar hidup layak. (diukur dari pendapatan nasional bruto per kapita). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara berada pada golongan [negara maju](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_maju), [negara berkembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang) atau bahkan [negara terbelakang](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_terbelakang) dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu negara. Menurut Direktur UNDP untuk Indonesia Cristophe Bahuet, untuk tahun 2013 dan 2014 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menempati urutan ke-108 dari 187 negara di dunia, (<http://www.benarnews.org/> indonesian/berita/hdi-indonesia-12152015164648.html, diakses tanggal 15 Desember 2015).

Banyak kalangan berpendapat bahwa berbagai persoalan yang menjadi pergumulan bangsa Indonesia disebabkan oleh kualitas sumberdaya manusianya yang masih rendah (Lampung Post, 09 Oktober 2013) baik secara akademis maupun nonakademis, sehingga belum seluruh masyarakat Indonesia dapat menyumbangkan potensinya secara maksimal baik fisik maupun nonfisik dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing.

Sumberdaya manusia merupakan pilar kemajuan suatu bangsa, dan untuk menilai kualitas sumberdaya manusia secara umum akan dapat dilihat dari mutu pembangunan bidang pendidikannya. Pembangunan sebagai proses pertumbuhan dan perubahan dalam rangka pembinaan bangsa, mensyaratkan pendidikan sebagai sarana pencapaian tujuan pembangunan, dengan demikian ini berarti pendidikan memegang peranan strategis dalam proses pembangunan.

Sekolah menengah sebagai bagian dari lembaga publik seharusnya dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan kepada masyarakat luas, karena sekolah merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat.

Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu komponen penting yang mempunyai peranan yang besar dan strategis dalam bidang pendidikan. Dalam hubungan ini, sekolah menengah kejuruan sebagai salah satu jenjang pendidikan yang ada di Indonesia memiliki posisi yang strategik dalam ikut mempersiapkan peserta didiknya berkompetisi dan meningkatkan prestasinya di era global ini.

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud (sebagai penanggung jawab teknis dalam penyiapan sumber daya manusia pada jenjang sekolah menengah baik SMA maupun SMK, memiliki misi yang dikenal sebagai **5 K,** yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan **ketersediaan** layanan pendidikan menengah.
2. Meningkatkan **keterjangkauan** layanan pendidikan menengah.
3. Meningkatkan **kualitas** / mutu dana relevansi layanan pendidikan memengah.
4. Meningkatkan **kesetaraan** dalam memperoleh layanan pendidikan menengah.
5. Meningkatkan **kepastian** / keterjaminan memperoleh layanan pendidikan menengah.

Dilihat dari segi usia peserta didiknya, sekolah menengah bertugas mempersiapkan potensi dan kemampuan penduduk usia produktif (15 - 18 tahun). Demikian pula dari segi tujuannya, sekolah menengah bertujuan: (1) meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian (2) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Khusus bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bertujuan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap professional.

UU No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa ada 3 (tiga) tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu: (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; dan (3) sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta menodorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi dalam bidang pendidikan maka desentralisasi bidang pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya dalam bidang pendidikan dengan tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan (Hasbullah, 2006:14). Diharapkan dengan adanya desentralisasi dalam bidang pendidikan ini akan dapat mendorong kabupaten/kota untuk berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang ada di daerah sehingga pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi pendidikan menurut Hamijoyo (1999:3), ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu: (1) pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis; (2) pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama; (3) peran serta masyarakat bukan hanya pada *stakeholders*, tetapi harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan; (4) pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak; dan (5) keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam kerangka dan demi penguatan system pendidikan nasional.

Tetapi dalam praktiknya di Kabupaten Minahasa Selatan, adanya desentralisasi khususnya dalam bidang pendidikan dimanfaatkan pemerintah daerah untuk ikut mengatur dan mengurus secara independen segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi pengorganisasian bidang pendidikan, termasuk di dalamnya pengelolaan administrasi pendidikan di sekolah menengah kejuruan.

Temuan penting berkaitan dengan pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beberapa tahun terakhir ini antara lain adalah adanya mutasi guru dan kepala sekolah yang dinilai sarat dengan berbagai kepentingan, tidak transparan serta dilakukan secara asal-asalan sehingga menuai protes dari berbagai pihak. (Manado Pos, 11 Juni 2010; Komentar, 30 April 2012; dan Tribun, 3 Juni 2013).

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaanya oleh pemerintah. Menurut Yusuf Ateh Kepala Bidang Akuntabilitas Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hingga saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia belum juga menunjukkan kemampuan pertanggungjawabannya, padahal salah satu ciri pemerintahan yang akuntabel adalah memiliki pengukuran, tujuan dan sasaran program yang diusulkan. (Kompas, November, 2009)

Selama ini pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud dengan gencarnya mensosialisasikan SMK sebagai jalur pendidikan yang memainkan peranan penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang terampil dengan sikap professional, siap berkompetisi di era global serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan berakhlak mulia dalam memasuki dunia kerja, demikian juga mengusung slogan “**SMK Bisa**”, dalam arti kata para lulusan SMK akan mudah terserap di dunia kerja, tetapi yang ditemukan masih banyak permasalahan yang membelit para siswa lulusan SMK ini untuk merealisasikan harapan dan impian mereka menerapkan *skill* sambil menciptakan lapangan kerja sendiri. Kenyataan yang ditemukan selama ini, terutama di Kabupaten Minahasa Selatan banyak sekolah menengah kejuruan yang belum maksimal melaksanakan tanggung jawabnya dalam kaitannya dengan administrasi penyelenggaraan pendidikan karena minimnya sarana prasarana yang ada serta terbatasnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dimiliki.

Di tempat lain pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui SKPD Dinas Dikpora dalam beberapa tahun belakangan ini mengadakan penambahan jumlah SMK baru dalam rangka memenuhi kebijakan reproporsionalisasi antara SMA dengan SMK (30:70%) yang menjadi target Kementerian Pendidikan Nasional dan termuat dalam Rencana Strategis 2005 – 2009 dan 2010 – 2014. Penambahan SMK-SMK baru ini diikuti dengan dilakukannya penyesuaian pada kompetensi keahlian yang diselenggarakan agar relevan dengan permintaan dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), yaitu pengelompokan program pendidikan SMK ke dalam 6 bidang studi keahlian, dan dibagi dalam 40 program studi keahlian, serta 121 kompetensi keahlian (Surat Dirjen Mandikdasmen No: 925/C.C5/KP/07 tanggal 28 Februari 2007).

Adanya penataan kompetensi keahlian dengan terbitnya spektrum keahlian dan pengembangan rasio SMA:SMK (30:70%) tersebut membawa konsekuensi pada pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya yaitu tenaga guru baik untuk kelompok bidang studi produktif, adaptif maupun normatif. Selain itu adanya perubahan komposisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya permintaan tenaga guru produktif yang akan mengajar di SMK yang saat ini masih dalam kategori terbatas.

Sementara di sisi lain, seiring dengan diberlakukannya desentralisasi pendidikan pada era otonomi daerah, pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenjang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (PP Nomor 38 tahun 2007).

Berkaitan dengan pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan, data yang dihimpun dari Manado Pos (tanggal 19 Maret 2013) formasi CPNS yang diterima Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 696 orang, untuk tenaga guru hanya 25 orang (SD, SMP, SMK, dan SMA), dan tahun 2015 (Manado Pos tanggal 5 Mei 2015) formasi CPNS yang diterima 150 orang, formasi untuk guru SMK – SMA ditetapkan hanya 25 orang yang diterima. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa pendirian SMK-SMK baru dalam rangka memenuhi kebijakan pemerintah tentang reproporsialisasi SMA – SMK di Kabupaten Minahasa Selatan ternyata tidak diikuti dengan pemenuhan tenaga guru sebagaimana yang diamanatkan dalam PP no 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Bab IV Pasal 6 (1) ayat 2.

Berdasarkan data penelitian pendahuluan pada 5 (lima) kepala SMK Negeri di Kabupaten Minahasa Selatan, diperoleh informasi fakta lapangan bahwa sekolah-sekolah tersebut masih kekurangan tenaga guru untuk kelompok bidang studi produktif, normatif dan adaptif, kekurangan ini sudah dibicarakan dengan pihak Dinas Dikpora, Komite Sekolah serta pemangku kepentingan lainnya seperti Dewan Pendidikan. Kekurangan tenaga guru ini tentu saja berimplikasi pada kualitas lulusan yang dihasilkan oleh SMK yang ada, sebagai lembaga yang bertugas untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dengan sikap profesional dan siap berkompetisi serta memberikan kontribusinya kepada masyarakat.

Berkembangnya beberapa temuan terkait dengan berbagai permasalahan yang melibatkan beberapa SMK Negeri sebagai institusi publik mengindikasikan bahwa SMK-SMK Negeri di Kabupaten Minahasa Selatan perlu menyelenggarakan administrasi pendidikannya secara akuntabel.

Tidak terpenuhinya aturan dalam hal ini kebijakan penyelenggaraan terhadap administrasi pendidikan yang akuntabel mengakibatkan terjadinya degradasi dalam pembangunan pendidikan yang telah diupayakan, sehingga sekolah-sekolah yang ada hkususnya SMK menjadi tidak maksimal dalam mempersiapkan para siswa lulusannya untuk bisa masuk ke dunia kerja, karena minimnya kompetensi keahlian yang dikuasai, atau bahkan keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, hingga berakibat pada rendahnya penghargaan dunia kerja terhadap siswa lulusan SMK, dan pada akhirnya para siswa lulusan SMK semakin menambah jumlah pengangguran di negeri ini.

Catatan keterangan yang berhasil dihimpun dari Dinas Dikpora Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan rekapitulasi pada laporan bulanan dari kepala-kepala SMK menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir jumlah siswa lulusan SMK di Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tahun Pelajaran 2010 – 2011 : jumlah siswa lulus sebanyak 1021 tercatat sebanyak 36,05 % tidak bekerja dan 15,66% tanpa keterangan.
2. Tahun Pelajaran 2011 – 2012 : jumlah siswa yang lulus sebanyak 1067 tercatat sebanyak 28,25 % tidak bekerja, serta 11,78 % tanpa keterangan ).
3. Tahun Pelajaran 2012 – 2013 : jumlah siswa yang lulus sebanyak 1103 tercatat 33,33% tidak bekerja, sementara 10,6% tanpa keterangan.
4. Tahun pelajaran 2013 – 2014 : jumlah siswa lulus sebanyak 1114 dan tercatat 298 (26,75 %) tidak bekerja serta 184 orang (16,51%) tanpa keterangan.

Data yang dikemukakan tersebut di atas sejalan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa posisi tingkat pengangguran terbuka secara nasional tahun 2013 lalu didominasi oleh lulusan SMK yaitu 11,21%, dan tahun 2014 sebesar 11,19% (Berita Resmi Statistik, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) diunduh tanggal 6 November 2014).

Menyimak UU no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab IV Pasal 10 yang mengatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikemukakan juga dalam pasal 11 angka (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, serta dalam PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dalam Bab I Pasal 1 angka 1 yang mengatakan bahwa (1) Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta dalam angka (2) Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Juga dalam Bab II Pasal 3 yang mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin (1) Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau (2) Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat dan (3) Efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Serta dalam Perpres no. 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN 2010 – 2014 yang menegaskan bahwa pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan potensial kebekerjaan, sehingga dalam kerangka inilah maka kualitas administrasi penyelenggaraan pendidikan di SMK-SMK yang ada perlu ditingkatkan serta mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak.

Dari data *empirical problem* di atas, maka penyelenggaraan administrasi pendidikan menengah kejuruan yang akuntabel di Kabupaten Minahasa Selatan merupakan suatu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian guna perkembangan pendidikan menengah kejuruan yang ada. Akuntabilitas administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di sekolah kejuruan berkorelasi secara signifikan dalam meningkatkan kemampuan sekolah untuk mempersiapkan para siswa lulusannya sebagai tenaga yang siap bekerja secara professional dan dapat bersaing di dunia kerja, jika dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan dan seharusnya dilaksanakan. Diharapkan dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka mutu pendidikan akan dapat ditingkatkan secara maksimal, sehingga kualitas sumberdaya manusia juga akan mengalami peningkatan secara signifikan.

Berangkat dari gambaran permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud mengkaji secara mendalam melalui serangkaian penelitian dengan judul “Akuntabilitas Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara”.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akuntabilitas administrasi perencanaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara ?
2. Bagaimanakah akuntabilitas pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara?
3. Bagaimanakah akuntabilitas pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara?
4. Faktor-faktor determinan apakah yang mempengaruhi akuntabilitas administrasi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara?
5. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menginterpretasikan dan mendeskripsikan:

1. Akuntabilitas administrasi perencanaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
2. Akuntabilitas administrasi pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
3. Akuntabilitas administrasi pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas administrasi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
5. **Manfaat Penelitian**
6. **Manfaat Teoretis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: (1) Bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenisatau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini, serta (2) Pengembangan khasanah keilmuan umumnya dan ilmu administrasi negara serta ilmu manajemen sumber daya manusia khususnya.

1. **Manfaat Praktis**

Secara praktis diharapkan penelitian ini memiliki nilai kegunaan bagi pihak-pihak sebagai berikut: (1) Bagi sekolah-sekolah, sebagai bahan masukan dan evaluasi penyempurnaan dan perbaikan kinerjanya ke depan (2) Bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan khususnya yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan pendidikan, ini merupakan masukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan akuntabilitas administrasi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan serta kualitas sumber daya manusia.